

BAB 2

KERANGKA TEORI

Kajian terdahulu

Jurnal yang berjudul evaluasi Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang di tulis oleh Wibisono, Rizky dan Tukiman (2017) dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa di Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga faktor kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum di penuhi oleh pedagang yaitu mengenai jumlah pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang.

Disisi lain Eka Evita (2013) dalam jurnalnya membahas mengenai implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (studi pada batu tourism center di kota batu) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pada batu tourism center merupakan implementasi yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan. Dilihat dari jurnal terdahulu diatas, di harapkan bagi peneliti dijadikan sebagi rujukan dalam menulis skripsi untuk memperkuat skripsi yang akan di buat agar tidak dikatakan plagiat.

Tinjauan umum

Implementasi kebijakan

Pengertian implementasi

Dalam suatu kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah untuk kebaikan bersama, harus terlebih dahulu di implementasikan karena suatu kebijakan otomatis mempunyai rencana untuk mendapatkan

tujuan yang ingin di capai. tanpa menerapkannya akan di katakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah tersebut gagal.

Implementasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan aktivitas yang saling menyesuaikan. Hal ini juga dijelaskan oleh McLaughin, seperti yang disebutkan dalam karya Nurdin dan Usman pada tahun 2004. Ungkapan-ungkapan tersebut secara tegas menyiratkan bahwa implementasi tidak semata-mata merupakan serangkaian aktivitas, melainkan sebuah upaya yang dijalankan dengan perencanaan yang matang serta penuh dedikasi. Pelaksanaan implementasi ini didasarkan pada pedoman-pedoman normatif tertentu, dengan tujuan utama mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan.

Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga di kemukakan oleh McLaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004).

Dalam konteks ini, Cheema dan Rondinelli (seperti yang dijelaskan dalam karya Wibawa, 2004: 15) mendefinisikan implementasi sebagai sebuah tahap yang meliputi pelaksanaan serta eksekusi dari suatu program kebijakan. Mereka juga menguraikan bahwa implementasi ini melibatkan serangkaian interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak terkait, dan pada akhirnya menentukan individu atau kelompok yang menjadi fokus dari pelaksanaan tersebut. Dengan kata lain, implementasi merupakan fase penting dalam mewujudkan suatu program kebijakan, yang melibatkan koordinasi dan interaksi antara berbagai elemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang telah direncanakan dengan matang sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Aktivitas ini memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi juga harus mempertimbangkan kondisi dan konteks sekitar yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, implementasi merupakan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan suatu kebijakan yang telah dirancang. Aktivitas ini tidak hanya berupa

serangkaian tindakan semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari keseluruhan siklus kebijakan. Selain mengikuti perencanaan yang telah dibuat, implementasi juga harus responsif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pengertian implementasi kebijakan

Dalam setiap tindakan untuk merumuskan suatu tindakan yang menyangkut program-program harus melewati terlebih dahulu suatu tindakan dalam mengimplementasikan, karena tanpa melewatinya suatu program tersebut tidak ada kegunaannya yang berarti.

Sesuai dengan dengan hal tersebut Hal Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146) mengemukakan, “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Selanjutnya dikemukakan oleh Charles O’Jones (Harahap, 2004:15) mengemukakan “Implementasi adalah suatu proses interaksi dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan 9 kata lain mengoperasikan sebuah program dengan dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Putra, 2003: 84), menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dilihat dari pernyataan beberapa ahli diatas, dapat di katakan bahwa implementasi kebijakan suatu kebijakan yang telah di buat dan telah pula di implementasikan, dalam sebuah kebijakan yang telah di implementasiakn tersebut dicari tujuan-tujuan yang ingin di capai dalam sebuah kebijakan yang telah di terapkan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali.

Model Implementasi Kebijakan

Seperti yang dikutip oleh Dwijowijoto (2006: 132) model ini ditemukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (siapa) pelaksana program
- 6) Sumber daya yang di kerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Model implementasi kebijakan menurut Goege Edwards III yang dikutip oleh Dwijowijoto (2006: 138). Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor utama atau variabel-variabel tersebut adalah:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber-sumber
- 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku.
- 4) Struktur birokrasi

Menurut Edwards III, ke empat faktor ini berpengaruh terhadap implementasikebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah 11 dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus.

Teori-Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori Donald S. Van dan Carl E. Van Hor

Menurut Meter dan Horn dalam AG. Subarsono (2010:99), ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran harus jelas dan terukur. Kaburnya standar dan sasaran kebijakan dapat menyebabkan multiinterpretasi dan konflik.

2. Sumber Daya

Implementasi memerlukan dukungan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia.

3. Hubungan Antar Organisasi

Untuk program yang melibatkan banyak instansi, koordinasi dan kerja sama antar instansi diperlukan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Ini mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang memengaruhi implementasi.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang mendukung implementasi.

6. Disposisi Implementor

Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan, pengaruh organisasinya, dan kepentingan pribadinya. Ini melibatkan pengetahuan, arah respon (menerima, netral, menolak), dan intensitas dukungan terhadap kebijakan.

2. Teori George Edward III

Edward III dalam AG. Subarsono (2010:90), mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

Penting dalam implementasi kebijakan:

a) Komunikasi

Penyebaran informasi harus jelas, tepat waktu, dan hati-hati agar menghindari distorsi informasi.

b) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

c) Sikap Implementor

Sikap implementor memainkan peran dalam mendukung implementasi, tergantung pada wewenang yang dimilikinya.

d) Struktur Birokrasi

Koordinasi antar lembaga atau organisasi yang terlibat penting untuk keberhasilan implementasi.

3. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam AG. Subarsono (2012:93), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan

dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target kelompok termuat dalam isi kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Pelaksanaan program

Sementara itu konteks implementasi adalah :

Model Grindle mengacu pada sejumlah elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Mari kita kembangkan pemahaman ini lebih lanjut:

- a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam konteks implementasi kebijakan, aktor yang terlibat, baik itu individu, kelompok, atau lembaga, sering kali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kekuasaan juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Strategi yang digunakan oleh aktor tersebut untuk memenuhi kepentingan mereka bisa berpengaruh pada proses implementasi.

b) Karakteristik, Lembaga, dan Penguasa

Karakteristik individu dan kelompok yang terlibat dalam implementasi dapat mempengaruhi bagaimana mereka menangani tugas-tugas implementasi. Selain itu, lembaga atau organisasi di mana mereka bekerja juga memiliki peran dalam membentuk pendekatan dan praktik implementasi. Penguasaan mereka atas sumber daya dan wewenang juga menjadi faktor penting.

c) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dari pihak implementator terhadap kebijakan yang ditetapkan dan kemampuan mereka untuk merespons perubahan atau masalah yang muncul selama implementasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi. Kemampuan untuk beradaptasi dan merespons situasi yang berkembang dapat membantu mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin timbul.

Model Grindle menekankan pentingnya memahami konteks implementasi kebijakan yang mencakup berbagai elemen seperti aktor, kepentingan, dan sumber daya. Dalam konteks ini, penelitian dan analisis yang cermat diperlukan untuk merancang dan mengelola implementasi kebijakan yang efektif.

Kebijakan publik

Pengertian kebijakan public

“A chosen course of action significantly affecting large numbers of people is a policy, if chosen by government, it is public policy” Definisi yang disajikan oleh Duncan Mac Rae, Jr, dan James A. Wilde, sebagaimana dikutip dalam karya Islamy (2003:42), memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep kebijakan (policy) dan kebijakan publik

(public policy).

Dalam pandangan mereka, sebuah kebijakan dapat dianggap sebagai suatu arah tindakan yang dipilih yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah besar orang. Namun, istilah "kebijakan" (policy) hanya digunakan ketika tindakan tersebut dipilih dan diterapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, ketika suatu tindakan atau pendekatan tertentu diperoleh dan diadopsi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berdampak luas pada masyarakat, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai kebijakan publik (public policy).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya merupakan keputusan atau tindakan sembarang, melainkan merupakan tindakan yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh pemerintah untuk memengaruhi secara signifikan banyak orang dan mempengaruhi arah perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Ini juga menyoroti peran penting pemerintah dalam merumuskan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan warga negara.

Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Friedrich seperti yang dikutip dalam karya Agustino (2008:35), kebijakan publik merupakan suatu konsep yang cukup komprehensif.

Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Konteks ini mencakup lingkungan yang mungkin memiliki berbagai hambatan dan kesulitan, namun juga berpotensi menyediakan peluang. Kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada agar tujuan tertentu dapat tercapai.

Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya sekadar keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah semata, tetapi juga dapat berasal dari individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan kompleksitas proses perumusan kebijakan di mana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan menjalankan tindakan yang relevan. Dalam kerangka ini, kebijakan publik menjadi alat untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam konteks yang dinamis dan beragam.

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Eyeston dalam Winarno (2014:23) yang memberikan gambaran penting tentang hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam konteks pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, karakteristik yang dikemukakan oleh Anderson (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014:24) menguraikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan sifat dan proses kebijakan publik. Berikut adalah pengembangan kata-kata untuk karakteristik tersebut:

a) Tujuan dan Maksud Tertentu

Kebijakan publik tidak sekadar merupakan serangkaian tindakan acak. Sebaliknya, itu adalah sebuah tindakan yang didasarkan pada tujuan dan maksud tertentu yang sudah ditentukan dengan jelas. Dalam konteks ini, kebijakan publik melibatkan perencanaan yang cermat oleh berbagai aktor kebijakan yang terlibat. Ini berarti kebijakan publik bukanlah produk yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari pemikiran dan strategi yang matang.

b) Tahapan Penerapan dan Pelaksanaan

Proses pembuatan kebijakan tidak berakhir ketika kebijakan tersebut telah dirumuskan. Sebaliknya, ada tahapan penting dalam penerapan dan pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya sebuah dokumen tertulis, tetapi juga sebuah proses yang melibatkan berbagai tindakan konkret dalam implementasinya.

c) Pertimbangan Terhadap Dampak

Kebijakan publik tidak hanya memikirkan aspek-aspek saat pembuatan kebijakan saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. Ini mencakup analisis konsekuensi jangka panjang dan berbagai skenario yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan tersebut.

d) Bentuk Positif dan Negatif

Kebijakan publik dapat mengambil berbagai bentuk, baik positif maupun negatif, tergantung pada tujuannya. Ini mencerminkan kompleksitas kebijakan publik, di mana kebijakan dapat mempromosikan perubahan positif atau mengatasi masalah, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.

e) Sifat yang Memaksa secara Sah

Salah satu perbedaan utama antara kebijakan publik dan kebijakan organisasi swasta adalah bahwa kebijakan publik memiliki sifat yang memaksa secara sah. Artinya, pemerintah memiliki otoritas untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan tersebut. Hal ini membedakan kebijakan publik dari kebijakan sektor swasta yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sama.

Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, kita dapat memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diterapkan, dan memengaruhi masyarakat serta lingkungannya.

Ciri-ciri kebijakan public

Kebijakan publik menurut Wahab (2014:17), pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian ia memiliki ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lain. Pernyataan ini membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini :

1. Tindakan yang Sengaja Dilakukan dengan Tujuan Tertentu

Kebijakan publik bukanlah tindakan sembarangan atau kebetulan. Sebaliknya, itu adalah serangkaian tindakan yang sengaja direncanakan dan diarahkan menuju tujuan tertentu. Ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kesadaran akan dampak dari setiap langkah yang diambil dalam proses kebijakan.

2. Keterkaitan dan Pola Tindakan

Kebijakan publik tidak terdiri dari keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kebijakan melibatkan tindakan-tindakan yang saling berhubungan dan membentuk suatu pola yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Ini mencerminkan koherensi dalam pendekatan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam konteks kebijakan publik.

3. Implementasi dalam Bidang-Bidang Tertentu

Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang. Ini menggambarkan sifat nyata dan praktis dari kebijakan publik, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak aspek, mulai dari pendidikan hingga ekonomi dan lingkungan.

4. Bentuk Positif dan Negatif

Kebijakan publik dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perbaikan atau penyelesaian masalah tertentu. Dalam bentuk negatif, kebijakan dapat mencakup keputusan-keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak campur tangan dalam situasi di mana intervensi pemerintah dianggap tidak diperlukan. Ini menyoroti fleksibilitas dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks.

Pemahaman ini menggambarkan kompleksitas kebijakan publik, yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan dampak di berbagai bidang kehidupan. Hal ini juga mencerminkan peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang dapat memengaruhi masyarakat dan lingkungannya, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun dengan tidak melakukan tindakan apa pun.

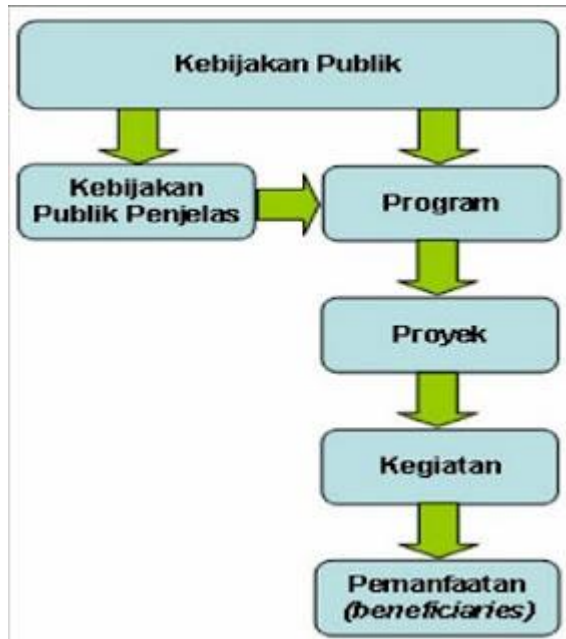
Model perumusan kebijakan public

Perumusan kebijakan adalah fase kunci dalam proses kebijakan publik yang menentukan batasan dan cakupan kebijakan. Ini bukan hanya formalitas, melainkan juga tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Model perumusan kebijakan, seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2012:545), termasuk

A.model institusional, di mana pemerintah memainkan peran sentral dalam pembuatan kebijakan karena peran dan fungsinya dalam konteks kelembagaan. Dye, dalam Nugroho (2012:546), mendukung pendekatan ini dengan mengakui tiga hal: pemerintah berwenang membuat kebijakan publik, beberapa fungsi bersifat universal, dan pemerintah memiliki peran penting dalam memaksa kebijakan.

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan.

Sumber :Nugroho (2012 :675)

Pedagang kaki lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sekelompok masyarakat yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjual barang dagangan di sekitar jalan atau di trotoar, tempat yang memungkinkan mereka untuk menarik pembeli. PKL biasanya beroperasi di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi oleh orang-orang.

Saat ini, lokasi berjualan PKL tidak lagi dibatasi oleh ukuran lima kaki (1,5 meter), melainkan disesuaikan dengan lahan yang tersedia atau yang dibutuhkan. Mereka bisa berjualan di berbagai tempat mulai dari pinggir jalan hingga lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Singkatnya, PKL dapat ditemukan di mana saja yang dianggap potensial untuk menghasilkan

keuntungan.

Asal-usul istilah "kaki lima" berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Pada waktu itu, peraturan pemerintah mengamanatkan bahwa setiap jalan harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan lebar lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan segmen usaha informal yang berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa. Di satu sisi, PKL adalah motor penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pinggiran. Dalam konteks ini, PKL memiliki peran yang signifikan sebagai produsen yang memenuhi kebutuhan banyak orang di Kota Bima, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Kehadiran PKL sangat membantu masyarakat setempat dengan mudahnya akses ke barang-barang yang dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Keberadaan mereka dalam komunitas menjadi penyokong sosial dan ekonomi yang penting. Seharusnya, pemerintah setempat mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas kepada PKL ini, mengingat dampak positif yang mereka miliki terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya mempertimbangkan peran penting PKL ini dalam mengisi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan ruang terhadap pedagang kaki lima (PKL)

Dalam pembangunan suatu fungsi kegiatan pada suatu ruang kota dalam hal ini khususnya kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Kaidah tersebut juga bagi sektor informal (PKL) sebagai sektor yang sering tersingkirkan dalam penataan kota. Menurut Budihardjo (2009:24), pewadahan kegiatan sektor informal seringkali keluar dari lokasi kawasan perkotaan yang strategis. Kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini selalu ditentukan pada pendekatan pasokan (supply) dan bukan pada pendekatan kebutuhan. Akibatnya timbulah kasus-kasus sarana perkotaan yang tidak terpakai. Rencana-rencana yang diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat yang berorientasi pada sektor keuntungan. Pedagang kaki lima beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan kaki yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah

atau kawasan komersil, Mc Gee dan

Yeung dalam Herawati (2007:44). Pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL telah diimplementasikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan karakteristik masing-masing kota. adapun pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL ini meliputi:

Pembangunan lokasional

1.Relokasi/Pemugaran

Ini mencakup pembangunan ulang suatu lokasi, baik dengan tujuan mengubah fungsinya menjadi yang berbeda dari sebelumnya atau memperbaiki kondisi yang telah ada. Tindakan ini juga harus memperhatikan kepentingan PKL sendiri, dengan memastikan bahwa relokasi atau pemugaran tidak mengganggu hubungan mereka dengan pelanggan atau akses mereka ke pasar. Jika tindakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan PKL, maka biasanya dapat diterima dengan baik. Pentingnya tindakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan sektor informal, sambil memastikan bahwa PKL dapat beroperasi dengan efektif dan tanpa gangguan yang berlebihan.

2.Stabilisasi/ pengaturan

Dalam pengaturan lokasi PKL, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan:

1. Peruntukan dalam Ruang Terbuka (Open Market)

Untuk memudahkan akses konsumen dan menjaga fungsi kota, PKL ditempatkan dalam ruang terbuka, tetapi tanpa mengganggu fungsi kota di sekitarnya.

2. Pembebasan atau Penutupan Jalan Tertentu

Melibatkan penutupan jalan-jalan tertentu bagi kendaraan bermotor dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Biasanya, ini bersifat sementara dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

3. Pemanfaatan Bagian Tertentu dari Jalan Trotoar

PKL ditempatkan pada jalan atau sebagian trotoar yang tidak mengganggu aktivitas sekitarnya. Setelah digunakan, PKL harus membersihkan area usahanya untuk menjaga fungsi kota.

4. Multifungsi Ruang Terbuka

Ruang terbuka seperti taman, lapangan, atau tempat parkir dapat dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu saat kurang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL.

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mengatur lokasi PKL dengan mempertimbangkan mobilitas, fungsi kota, dan keberlanjutan sektor informal, sambil memastikan kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar.

3. Removal/pemindahan

Dimaksudkan untuk pemindahan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang diterapkan sebagai lokasi sektor informal. Adapun upaya memindahkannya secara permanen ke dalam pasar yang telah dilakukan pada beberapa kota, terdapat kendala yaitu pertama rancangan bangunan yang tidak sesuai dimana rancangan fisik pasar sangat penting bagi kebutuhan yang bermacam-macam dan tipe yang berbeda-beda pula. kedua, adalah faktor finansial yaitu terkait dengan tarif sewa ruang di dalam pasar yang tinggi sehingga salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan membuat ruang-ruang kecil untuk menekan harga sewa, namun hal tersebut juga masih terdapat kendala yaitu jenis komoditas dagangannya. Sehingga apabila dilakukan upaya memindahkan sektor informal ke pasar legal, maka pertimbangannya adalah rancangan bangunan pasar yang sesuai dan akomodatif, tingkat harga sewa yang memadai, rencana yang terperinci, dan jarak lokasi berjualan dari tempat berjualan semula.

Pola Pengelolaan Struktural

Pemerintah kota biasanya lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk pengelolaan

lokasional, pemerintah kota juga mencoba pola pengelolaan struktural.

Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural adalah sebagai berikut:

1) Perajinan

Perajinan usaha pada kelompok PKL didasari menurut jenis dan barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha, dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivis PKL dalam melakukan usahannya didasari atas pertimbangan untuk Memudahkan dalam pengaturan, pengawasan, dan pembatasan jumlah serta Membantu dalam penarikan retribusi

2) Pembinaan

Tindakan pengendalian dalam hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan, karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di Malaysia pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat PKL, dari pembinaan ini diharapkan dapat membatasi jumlah PKL seiring dengan kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

3) Bantuan/pinjaman

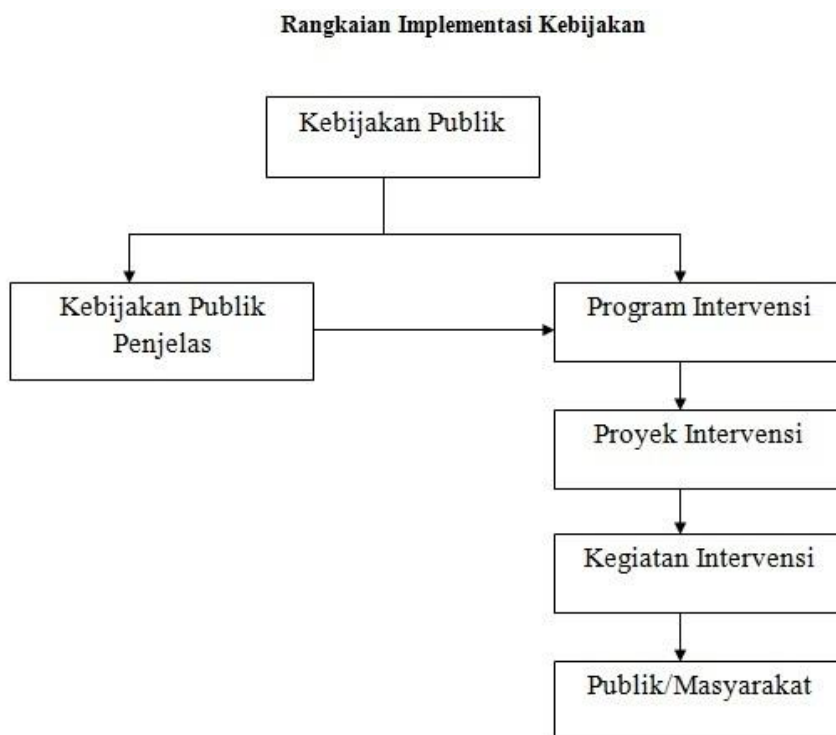
Pemberian bantuan dan pinjaman untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi bagi PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti swasta, LSM, dan lainnya

Kerangka pikir

Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam membimbing, mengarahkan dan mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sepanjang jalan yang ada di kota Bandar Lampung. Untuk itu, Pemerintah Kota dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dari hasil pembinaan diharapkan mampu mengendalikan lokasi aktifitas dan

jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) serta adanya pengaturan penataan dalam usaha kaki lima sehingga dapat tercapai kondisi yang tertib dan teratur yang berimplikasi kepada ketertiban, keindahan dan kenyamanan Kota bandar lampung. Penulis berusaha menggambarkan kedalam kerangka konsep ini kedalam bagan yang sederhana:



DAFTAR PUSTAKA

- Febrilianawati, A. I. (2010). Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima (pkl) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.
- Akbar, A., Tahir, M., & Nasrulhaq, N. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1398-1411.
- Rahmi, H. (2013). *Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sihombing, S. M. H. (2023). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pasar Kota (Studi Kasus: Gang Siku)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

friday Safaria, A., Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92-100.

NEGARA, B. H. A. (2012). Ilmu Administrasi Negara.